



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2021 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas belanja pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan serta untuk melengkapi besaran belanja perjalanan dinas sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan...

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 2 (dua) rincian, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan daerah.
- (2) Standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. ketentuan standar harga satuan khusus;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - f. satuan biaya pemeliharaan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, dan ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud.
- (2) Pengaturan batasan jumlah kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. klasifikasi I dengan jumlah kegiatan untuk Pejabat Eselon II sebanyak 2 (dua), Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) dan Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) dengan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) per bulan;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal untuk perjalanan dinas :
 - a. luar daerah luar provinsi;
 - b. luar daerah dalam provinsi;
 - c. dalam daerah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
4. Ketentuan Pasal 30 huruf c dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. transportasi luar daerah luar provinsi;
- b. transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
- c. dihapus.

5. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias, biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 Jam;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus; dan
 - d. perjalanan dinas yang harus menggunakan *Jeep/Double Gardan* dibayar secara *at cost*.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan SPT dan SPPD.
 - (4) Uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
 - (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sewa kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
 - (6) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 47 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada perangkat daerahnya.
 - (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada perangkat daerah yang berwenang tersebut.
 - (2a) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas yang diperintahkan lebih dari 1 (satu) orang dan memiliki tujuan serta jumlah hari yang sama dalam satu SPT, maka SPPD dapat disatukan pada tabel pengikut.
 - (3) Format SPPD perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 72A dan Pasal 72 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72 A

- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72 B ...

Pasal 72 B

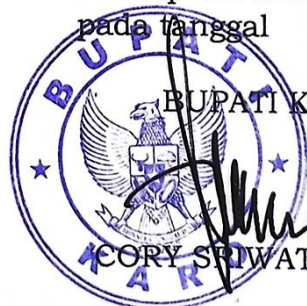
- (1) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 11. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KARO NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
 ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH			
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa BUD/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.420.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.840.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.250.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.770.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.290.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.810.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000	
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	880.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.830.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	3.230.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	3.620.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000	
4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	770.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.470.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.810.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	3.160.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	370.000	
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	640.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.580.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.840.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.090.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000	
6	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (SKPKD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	510.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	710.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	810.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	910.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.010.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.210.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.310.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.410.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.510.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.810.000	
7	Pejabat Penatausahaan Barang (SKPKD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	460.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	610.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	660.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	760.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	960.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.160.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.260.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.360.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.460.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.760.000	
8	Pejabat Pengurus Barang Pengelola (SKPKD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	360.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	510.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	560.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	660.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	760.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	860.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.060.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.160.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.260.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.360.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.660.000	
9	Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (SKPD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	410.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	560.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	610.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	710.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	810.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	910.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.110.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.210.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.310.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.410.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.710.000	
10	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	310.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	460.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	510.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	610.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	710.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.010.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.110.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.210.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.310.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.610.000	
11	Pejabat Pengurus Barang Pengguna (SKPD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	400.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	450.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	550.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	650.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	750.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	950.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.050.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.150.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.250.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.550.000	
12	Pejabat Pengurus Barang Pembantu (SKPD)			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	210.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	360.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	410.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	510.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	610.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	710.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	910.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.010.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.110.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.210.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.510.000	
13	Pembantu Pengurus Barang			
	1 Nilai Aset di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	110.000	
	2 Nilai Aset di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	260.000	
	3 Nilai Aset di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	310.000	
	4 Nilai Aset di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	410.000	
	5 Nilai Aset di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	510.000	
	6 Nilai Aset di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	610.000	
	7 Nilai Aset di Atas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	810.000	
	8 Nilai Aset di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	910.000	
	9 Nilai Aset di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.010.000	
	10 Nilai Aset di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.110.000	
	11 Nilai Aset di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.410.000	
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
1	Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa			
	1 Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa	OB	680.000	
2	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaaan Barang/Jasa			
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	1 Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	680.000	
	2 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
	3 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	1.020.000	
	4 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.270.000	
	5 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.520.000	
	6 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.780.000	
	7 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	2.120.000	
	8 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.450.000	
	9 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.790.000	
	10 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	3.130.000	
	11 Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
12	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
13	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
14	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
15	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
1	Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	760.000	
2	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
3	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	920.000	
4	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.140.000	
5	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.370.000	
6	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000	
7	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.910.000	
8	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.210.000	
9	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.520.000	
10	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.820.000	
11	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
12	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
13	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
14	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
15	Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
1	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi s.d Rp. 50 Juta	OP	450.000	
2	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 Juta	OP	450.000	
3	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi s.d Rp. 100 Juta	OP	450.000	
4	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480.000	
5	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600.000	
6	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720.000	
7	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	910.000	
8	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1.090.000	
9	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1.270.000	
10	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
11	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
12	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
13	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
14	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
15	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
16	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
17	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
18	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
2	Pengguna Anggaran			
	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1	Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar sd. Rp. 150 Miliar	OP	3.580.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	
	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
1	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.100 Miliar sd. Rp. 150 Miliar	OP	3.230.000	
2	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
3	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
4	Nilai Pagu Dana di Atas Rp.750 Miliar sd. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
5	Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	1 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1.510.000	
	2 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1.750.000	
	3 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1.990.000	
	4 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2.230.000	
	5 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2.560.000	
	6 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2.880.000	
	7 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3.200.000	
	8 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
	9 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	
	Pejabat Pembuat Komitmen			
	1 Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
	2 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
	3 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
	4 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.510.000	
	5 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
	6 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
	7 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
	8 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
	9 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
	10 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
	11 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
	12 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
	13 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
	14 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
	15 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 750 Miliar Rp. 1 Triliun	OB	6.140.000	
	16 Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
1	Perangkat UKPBJ			
	1 Kepala	OB	1.000.000	
	2 Sekretariat/Staf Pendukung	OB	750.000	
4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA			
1	Narasumber/Pembahas			
	1 Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	
	2 Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000	
	3 Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	OJ	1.200.000	
	4 Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	OJ	1.000.000	
	5 Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang Disetarakan	OJ	900.000	
	6 Narasumber/ Pembahas Profesional (Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus)	OJ	1.700.000	
2	Moderator			
	1 Moderator	OK	700.000	
	2 Moderator Profesional (Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus)	OK	1.000.000	
3	Pembawa Acara			
	1 Pembawa Acara	OK	400.000	
	2 Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, Pembicara Khusus)	OK	750.000	
4	Panitia			
	1 Penanggungjawab	OK	450.000	
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3 Sekretaris	OK	300.000	
	4 Anggota	OK	300.000	
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
1	Tim Pelaksana Kegiatan			
	Ditetapkan oleh Kepala Daerah			

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	1 Pengarah	OB	1.500.000	
	2 Penanggungjawab	OB	1.250.000	
	3 Ketua	OB	1.000.000	
	4 Wakil Ketua	OB	850.000	
	5 Sekretaris	OB	750.000	
	6 Anggota	OB	750.000	
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	1 Pengarah	OB	750.000	
	2 Penanggungjawab	OB	700.000	
	3 Ketua	OB	650.000	
	4 Wakil Ketua	OB	600.000	
	5 Sekretaris	OB	500.000	
	6 Anggota	OB	500.000	
2	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
	1 Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	2 Anggota	OB	220.000	
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI BERACARA			
1	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli/Saksi Ahli Beracara			
	1 Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	500.000	
	2 Beracara	OK	500.000	
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1	Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil			
	1 SLTA	OB	2.100.000	
	2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	4 Master (S2)	OB	2.800.000	
	5 Doktor (S3)	OB	3.000.000	
8	HONORARIUM ROHANIWAN			
	1 Rohaniwan	OK	400.000	
9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
1	Tim Penyusun Jurnal			
	1 Penanggungjawab	Oter	500.000	
	2 Redaktur	Oter	400.000	
	3 Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretaris	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	Per Hal	200.000	
2	Tim Penyusun Buletin/Majalah			
	1 Penanggungjawab	Oter	400.000	
	2 Redaktur	Oter	300.000	
	3 Penyunting/Editor	Oter	250.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretaris	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	Per Hal	100.000	
3	Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
	1 Penanggungjawab	OB	500.000	
	2 Redaktur	OB	450.000	
	3 Editor	OB	400.000	
	4 Web Admin	OB	350.000	
	5 Web Developer	OB	300.000	
	6 Pembuat Artikel	Per Hal	100.000	
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	2 Pengawas Ujian	OH	240.000	
	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	5.000	
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /	190.000	
	2 Pengawas Ujian	OH	270.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
	3 Periksa Hasil Ujian	Siswa /	7.500	
11	HONORARIUM PENULIS/TELAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
1	Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	1 Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
	2 Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	1 Telaah Materi Soal	Per Butir	45.000	
	2 Telaah Bahasa Soal	Per Butir	20.000	
12	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
1	Penceramah/Pengajar/Penyusun Modul			
	1 Penceramah	OJP	1.000.000	
	2 Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000	
	3 Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000	
	4 Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
2	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 Hari			
	1 Penanggungjawab	OK	450.000	
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	3 Sekretaris	OK	300.000	
	4 Anggota	OK	300.000	
	Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari			
	1 Penanggungjawab	OK	675.000	
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
	3 Sekretaris	OK	450.000	
	4 Anggota	OK	450.000	
	Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari			
	1 Penanggungjawab	OK	900.000	
	2 Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
	3 Sekretaris	OK	600.000	
	4 Anggota	OK	600.000	
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	1 Pembina	OB	3.500.000	
	2 Pengarah	OB	3.000.000	
	3 Ketua	OB	2.500.000	
	4 Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	5 Sekretaris	OB	1.500.000	
	6 Anggota	OB	1.300.000	
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	1 Ketua	OB	1.000.000	
	2 Sekretaris	OB	900.000	
	3 Anggota	OB	600.000	
14	HONORARIUM NON APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Non Aparatur Sipil Negara			
	1 Supir KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.065.000	
	2 Adc KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.015.000	
	3 Adc/Supir Asisten	OB	1.465.000	
	4 Petugas Rumah Tangga KDH/Wakil KDH/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	1.765.000	
	5 Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	1.265.000	
	6 Petugas Penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH	OB	1.265.000	
	7 Petugas Ekskalator dan Lift	OB	1.265.000	
	8 Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	1.265.000	
	9 Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.065.000	
	10 Adc Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.015.000	
	11 Dokter Spesialis	OB	20.000.000	
	12 Dokter Umum	OB	3.265.000	
	13 Tenaga Paramedis	OB	1.165.000	
	14 Tenaga Teknis Lab. Dinas Pertanian dan Perkebunan	OB	1.565.000	
	15 Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.215.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
		OB	1.415.000	
		OB	1.265.000	
	16 Supir SKPD	OB	1.465.000	
	17 Petugas Jaga Malam Kantor	OB	1.165.000	
	18 Teknis LPJU	OB	1.165.000	
	19 Petugas LLAJ/Terminal	OB	1.415.000	
	20 Petugas KPP	OB	1.265.000	
	21 Petugas RSU	OB	1.265.000	
	22 Petugas Rumah Dinas Bupati	OB	1.415.000	
	23 Petugas Pemungut Retribusi/Pajak Daerah	OB	1.265.000	
	24 Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.265.000	
	25 Anggota Pemadam Kebakaran	OB	1.265.000	
	26 Petugas Hansip/Linmas	OB	1.265.000	
	27 Polisi Pamong Praja	OB	1.265.000	
	28 Petugas Perpustakaan	OB	1.265.000	
	29 Operator Komputer	OB		
	30 Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Karo)		1.265.000	
		OB	1.265.000	
	31 Petugas Perikanan (BBI)	OB	1.265.000	
	32 Petugas Inseminasi (Inseminator)	OB	1.265.000	
	33 Supir Operasional Penertiban Peraturan/Sosial	OB	1.265.000	
	34 Pegawai Harian Lepas Lainnya	OB	1.265.000	
	35 Petugas Rumah Potong Hewan	OB	1.065.000	
	36 Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan	OB	1.765.000	
	37 Guru Bahasa Asing			

1.2. PENGATURAN BATASAN JUMLAH TIM

NO	JABATAN	KLASIFIKASI I	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon II	2	Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan
2	Pejabat Eselon III	3	tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan


 CORY SRWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1. SATUAN BIAYA UANG SAKU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BANTUAN UANG SAKU			
1	Bantuan Uang Saku/Transportasi			
1	Uang Saku	OH	50.000	
2	Uang Transportasi	OH	50.000	

2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
1	2	3	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	9
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH							
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	Kecamatan se-Kabupaten Karo:							
	- Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 Jam	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI							
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi							
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
3	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR							
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi							
	1 Aceh	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	2 Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	3 Kepulauan Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	4 Jambi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	5 Sumatera Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	6 Sumatera Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	7 Lampung	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	8 Bengkulu	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	9 Bangka Belitung	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	10 Banten	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	11 Jawa Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	12 DKI Jakarta	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
	13 Jawa Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	14 DI Yogyakarta	OH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	15 Jawa Timur	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	16 Bali	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	17 Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	18 Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	19 Kalimantan Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	20 Kalimantan Tengah	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	21 Kalimantan Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	22 Kalimantan Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	23 Kalimantan Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	24 Sulawesi Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	25 Gorontalo	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	26 Sulawesi Barat	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	27 Sulawesi Selatan	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	28 Sulawesi Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	29 Sulawesi Tenggara	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	30 Maluku	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	31 Maluku Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	32 Papua	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	33 Papua Barat	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Pendidikan dan Pelatihan							
	1 Aceh	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	2 Sumatera Utara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	3 Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	4 Kepulauan Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	5 Jambi	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	6 Sumatera Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	7 Sumatera Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	8 Lampung	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	9 Bengkulu	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	10 Bangka Belitung	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	11 Banten	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	12 Jawa Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	

13	DKI Jakarta	OH	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	DI Yogyakarta	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	Bali	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	Gorontalo	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31	Maluku	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
33	Papua	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
34	Papua Barat	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BEBARAN (Rp)		KET
			BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	TIKET PESAWAT UDARA				
1	Pesawat Udara				
	1 Aceh (Banda Aceh)	PP	3.466.000	2.193.000	
	2 Sumatera Utara (Gunung Sitoli)	PP	3.466.000	2.193.000	
	3 Riau (Pekanbaru)	PP	2.065.100	1.078.400	
	4 Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	6.422.800	2.977.600	
	5 Kepulauan Riau (Batam)	PP	10.193.000	5.316.000	
	6 Jambi (Jambi)	PP	9.623.300	3.244.000	
	7 Sumatera Barat (Padang)	PP	962.000	962.000	
	8 Sumatera Selatan (Palembang)	PP	3.099.100	1.068.600	
	9 Lampung (Bandar Lampung)	PP	7.979.000	4.150.000	
	10 Bengkulu (Bengkulu)	PP	6.707.700	3.155.800	
	11 Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	8.888.000	4.653.000	
	12 Banten (Serang)	PP	7.252.000	3.808.000	
	13 Jawa Barat (Bandung)	PP	7.252.000	3.808.000	
	14 DKI Jakarta (Jakarta)	PP	7.252.000	3.808.000	
	15 Jawa Tengah (Semarang)	PP	9.284.000	4.696.000	
	16 DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	9.519.000	4.770.000	
	17 Jawa Tengah (Solo)	PP	9.284.000	4.835.000	
	18 Jawa Timur (Surabaya)	PP	10.739.000	5.134.000	
	19 Jawa Timur (Malang)	PP	9.958.000	5.145.000	
	20 Bali (Denpasar)	PP	10.589.000	5.658.000	
	21 Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	10.600.000	5.637.000	
	22 Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	11.678.100	5.292.600	
	23 Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	9.733.000	5.230.000	
	24 Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	10.300.000	5.412.000	
	25 Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	10.546.000	5.412.000	
	26 Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	12.493.000	6.140.000	
	27 Sulawesi Utara (Manado)	PP	15.552.000	7.316.000	
	28 Gorontalo (Gorontalo)	PP	11.233.700	4.866.900	
	29 Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	4.390.200	2.449.300	
	30 Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	12.514.000	6.172.000	
	31 Sulawesi Tengah (Palu)	PP	10.383.900	4.525.300	
	32 Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	8.639.300	4.305.900	
	33 Maluku (Ambon)	PP	11.525.700	4.857.500	
	34 Maluku Utara (Ternate)	PP	11.431.400	4.216.500	
	35 Papua (Biak)	PP	18.472.000	9.498.000	
	36 Papua (Jayapura)	PP	18.932.000	10.097.000	
	37 Papua Tengah (Timika)	PP	18.258.000	9.455.000	
	38 Papua Barat (Manokwari)	PP	13.754.300	7.066.300	
2	TRANSPORTASI/TAXI/ANGKUTAN UMUM/ UANG BBM LUAR DAERAH DALAM				
1	Transportasi/Taxi/Angkutan Umum/ Uang				
	1 Kabupaten Asahan				
	Kisaran	Orang/ Kali	259.000	259.000	
	2 Kabupaten Batubara				
	Lima Puluh	Orang/ Kali	225.000	225.000	
	3 Kabupaten Dalri				
	Sidikalang	Orang/ Kali	270.000	270.000	
	4 Kabupaten Deli Serdang				
	Lubuk Pakam	Orang/ Kali	186.000	186.000	
	5 Kabupaten Humbang Hasundutan				
	Dolok Sanggul	Orang/ Kali	300.000	300.000	
	6 Medan				
	Medan	Orang/ Kali	200.000	200.000	
	7 Kabupaten Labuhan Batu				
	Rantau Prapat	Orang/ Kali	287.000	287.000	
	8 Kabupaten Labuhan Batu Selatan				
	Kota Pinang	Orang/ Kali	360.000	360.000	

	9	Kabupaten Labuhan Batu Utara			
		Aek Kanopan	Orang/Kali	300.000	300.000
	10	Kabupaten Langkat			
		Stabat	Orang/Kali	186.000	186.000
	11	Kabupaten Mandailing Natal			
		Penyabungan	Orang/Kali	420.000	420.000
	12	Kabupaten Padang Lawas			
		Sibuhuan	Orang/Kali	420.000	420.000
	13	Kabupaten Padang Lawas Utara			
		Gunung Tua	Orang/Kali	420.000	420.000
z	14	Kabupaten Pakpak Bharat			
		Salak	Orang/Kali	300.000	300.000
	15	Kabupaten Samosir			
		Pangururan	Orang/Kali	330.000	330.000
	16	Kabupaten Serdang Bedagai			
		Sei Rampah	Orang/Kali	200.000	200.000
	17	Kabupaten Simalungun			
		Pematang Raya	Orang/Kali	264.000	264.000
	18	Kabupaten Tapanuli Selatan			
		Sipirok	Orang/Kali	328.000	328.000
	19	Kabupaten Tapanuli Tengah			
		Pandan	Orang/Kali	345.000	345.000
	20	Kabupaten Tapanuli Utara			
		Tarutung	Orang/Kali	330.000	330.000
	21	Kabupaten Toba Samosir			
		Balige	Orang/Kali	300.000	300.000
	22	Kota Binjai			
		Binjai	Orang/Kali	180.000	180.000
	23	Kota Pematang Siantar			
		Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000	225.000
	24	Kota Sibolga			
		Sibolga	Orang/Kali	345.000	345.000
	25	Kota Tanjung Balai			
		Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000	285.000
	26	Kota Tebing Tinggi			
		Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000	203.000
3		TRANSPORTASI/TAXI/ANGKUTAN UMUM/ANGKUTAN BEM LUAR DAERAH LUAR			
1		Aceh (Banda Aceh)			
	1	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000	275.000
	2	Kab. Aceh Barat daya	Orang/Kali	298.000	298.000
	3	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000	183.000
	4	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000	238.000
	5	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000	325.000
	6	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000	420.000
	7	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000	315.000
	8	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000	293.000
	9	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000	460.000
	10	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000	289.000
	11	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000	270.000
	12	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000	278.000
	13	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000	220.000
	14	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000	370.000
	15	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000	275.000
	16	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000	190.000
	17	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000	205.000
	18	Kota Lingsa	Orang/Kali	301.000	301.000
	19	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000	240.000
	20	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000	400.000
2		Riau (Pekanbaru)			
	1	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000	380.000
	2	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000	315.000
	3	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000	200.000
	4	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000	300.000
	5	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000	225.000
	6	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000	350.000
	7	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000	322.000
	8	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000	350.000
	9	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000	400.000
3		Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)			
	1	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000	185.000
4		Jambi (Jambi)			
	1	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000	175.000
	2	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000	270.000
	3	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000	325.000
	4	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000	260.000
	5	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000	170.000
	6	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000	241.000
	7	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000	225.000
	8	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000	190.000

9	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000	250.000
10	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000	308.000
5	Sumatera Barat (Padang)			
1	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000	225.000
2	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000	250.000
3	Kab. Lima Puluhan Kota	Orang/Kali	225.000	225.000
4	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000	205.000
5	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000	250.000
6	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000	250.000
7	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000	205.000
8	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000	225.000
9	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000	210.000
10	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000
11	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000	220.000
12	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000	215.000
13	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000	210.000
14	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000	200.000
15	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000	225.000
16	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000	215.000
17	Kota Solok	Orang/Kali	210.000	210.000
6	Sumatera Selatan (Palembang)			
1	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000	203.000
2	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000	315.000
3	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000	250.000
4	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000	235.000
5	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000	235.000
6	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000	320.000
7	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000	325.000
8	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000
9	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000
10	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000	248.000
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000	245.000
13	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000	265.000
14	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000	290.000
15	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000	280.000
16	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000	205.000
7	Lampung (Bandar Lampung)			
1	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000	270.000
2	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000	234.000
3	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000	246.000
4	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000	246.000
5	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000	252.000
6	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000	276.000
7	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000	216.000
8	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000	200.000
9	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000	222.000
10	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000	240.000
11	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000	252.000
12	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000	267.000
13	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000	270.000
14	Kota Metro	Orang/Kali	234.000	234.000
8	Bengkulu (Bengkulu)			
1	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000	344.000
2	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000	232.000
3	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000	313.000
4	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000	385.000
5	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000	298.000
6	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000	375.000
7	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000	423.000
8	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000	313.000
9	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000	282.000
9	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)			
1	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000	250.000
2	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000	275.000
3	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000	275.000
4	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000	250.000
10	Banten (Serang)			
1	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000	208.000
2	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000	138.000
3	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000	160.000
4	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000	254.000
5	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000	160.000
6	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000	313.000
7	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000	347.000
11	Jawa Barat (Bandung)			
1	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000	183.000
2	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000	275.000
3	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000
4	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000	185.000
5	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000	245.000
6	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000	215.000
7	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000	280.000
8	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000	243.000
9	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000	275.000
10	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000	248.000
11	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000	275.000
12	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000	235.000
13	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000	283.000
14	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000	218.000
15	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000	208.000

16	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000	245.000
17	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000	230.000
18	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000	245.000
19	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000	283.000
20	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000
21	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000	285.000
22	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000	168.000
23	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000	270.000
24	Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000
25	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000	226.000
26	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000	245.000
12	DKI Jakarta (Jakarta)			
1	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000
2	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000
3	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000
4	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000
5	Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000
6	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000	286.000
7	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000	286.000
8	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000	310.000
9	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000	428.000
13	Jawa Tengah (Semarang)			
1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000	260.000
2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000	257.000
3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000	240.000
4	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000	270.000
5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000	240.000
6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000	263.000
7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000	280.000
8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000	230.000
9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000	235.000
10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000	240.000
11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000	250.000
12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000	260.000
13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000	230.000
14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000	250.000
15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000	235.000
16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000
17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000	240.000
18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000
19	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000	250.000
20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000	270.000
21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000	250.000
22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000	250.000
23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000	230.000
24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000	250.000
25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000	250.000
26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000
27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000	240.000
28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000	250.000
29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000	250.000
30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000
31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000
32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000	235.000
33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000	245.000
34	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000
14	D.I Yogyakarta (Yogyakarta)			
1	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000	250.000
2	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000	350.000
3	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000	350.000
4	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000	200.000
15	Jawa Timur (Surabaya)			
1	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000	225.000
2	Kab. Bantul	Orang/Kali	285.000	285.000
3	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000
4	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000
5	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000	255.000
6	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000	225.000
7	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000	261.000
8	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000	235.000
9	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000	235.000
10	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000	225.000
11	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000	261.000
12	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000	245.000
13	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000	253.000
14	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000	228.000
15	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000	225.000
16	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000	245.000
17	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000	253.000
18	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000	285.000
19	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000	243.000
20	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000	228.000
21	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000	255.000
22	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000	228.000
23	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000	235.000
24	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000	240.000
25	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000	255.000
26	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000	255.000
27	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000	245.000
28	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000	245.000
29	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000	245.000
30	Kota Batu	Orang/Kali	242.000	242.000
31	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000
32	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000

33	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000	235.000
34	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000	245.000
35	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000	228.000
36	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000	225.000
37	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000	228.000
16	Bali (Denpasar)			
1	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000	188.000
2	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000	225.000
3	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000	265.000
4	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000	225.000
5	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000	270.000
6	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000	263.000
7	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000	225.000
17	Nusa Tenggara Barat (Mataram)			
1	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000	325.000
2	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000	450.000
3	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000	350.000
18	Nusa Tenggara Timur (Kupang)			
1	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000	325.000
2	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000	175.000
3	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000	218.000
4	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000	275.000
19	Kalimantan Barat (Pontianak)			
1	Kab. Bengkayanag	Orang/ Kali	270.000	270.000
2	Kab. Kapuas hulu	Orang/ Kali	550.000	550.000
3	Kab. Kapuas Utara	Orang/ Kali	550.000	550.000
4	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000	550.000
5	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000	185.000
6	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000	270.000
7	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000	430.000
8	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000	230.000
9	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000	300.000
10	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000	303.000
11	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000	343.000
12	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000	392.000
13	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000	257.000
20	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)			
1	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	290.000	290.000
2	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	333.000	333.000
3	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000	425.000
4	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000	300.000
5	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000	275.000
6	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000	250.000
7	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000	425.000
8	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000	300.000
9	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000	525.000
10	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000	448.000
11	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000	250.000
12	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000	328.000
13	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000	525.000
21	Kalimantan Selatan (Banjarasin)			
1	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000	230.000
2	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000	170.000
3	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000	200.000
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000	200.000
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000	212.000
6	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000	218.000
7	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000	290.000
8	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000	234.000
9	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000	300.000
10	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000	200.000
11	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000	189.000
12	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000	225.000
22	Kalimantan Timur (Samarinda)			
1	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000	1.500.000
2	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000	500.000
3	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000	1.350.000
4	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000	1.650.000
5	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000	650.000
6	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000	550.000
7	Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000	600.000
23	Sulawesi Utara (Manado)			
1	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000	250.000
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	275.000	275.000
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000	250.000
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000	300.000
5	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000	180.000
6	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000	180.000
7	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000	200.000
8	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000	175.000
9	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000	175.000
10	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000	250.000
11	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000	170.000
24	Gorontalo (Gorontalo)			
1	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000	400.000
2	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000	300.000
3	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000	350.000
4	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000	650.000

25	Sulawesi Barat (Mamuju)			
	1 Kab. Majene	Orang/Kali	240.000	240.000
	2 Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000	359.000
	3 Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000	200.000
	4 Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000	270.000
	5 Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000	260.000
26	Sulawesi Selatan (Makassar)			
	1 Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000	235.000
	2 Kab. Barru	Orang/Kali	210.000	210.000
	3 Kab. Bone	Orang/Kali	240.000	240.000
	4 Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000	240.000
	5 Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000	250.000
	6 Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000	175.000
	7 Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000	230.000
	8 Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000	350.000
	9 Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000	375.000
	10 Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000	365.000
	11 Kab. Maros	Orang/Kali	170.000	170.000
	12 Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000	230.000
	13 Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000	230.000
	14 Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000	235.000
	15 Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000	235.000
	16 Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000	190.000
	17 Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000	350.000
	18 Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000	350.000
	19 Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000	230.000
	20 Kota Palopo	Orang/Kali	350.000	350.000
	21 Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000	225.000
27	Sulawesi Tengah (Palu)			
	1 Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000	400.000
	2 Kab. Buol	Orang/Kali	472.000	472.000
	3 Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000	130.000
	4 Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000	400.000
	5 Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000	400.000
	6 Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000	250.000
	7 Kab. Poso	Orang/Kali	280.000	280.000
	8 Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000	219.000
	9 Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000	350.000
	10 Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000	412.000
28	Sulawesi Tenggara (Kendari)			
	1 Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000	355.000
	2 Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000	370.000
	3 Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000	300.000
	4 Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000	425.000
	5 Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000	300.000
	6 Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000	305.000
	7 Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000	300.000
29	Maluku Utara (Soefi)			
	1 Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000	850.000
	2 Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000
	3 Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000	1.250.000
	4 Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000	900.000
30	Papua (Jayapura)			
	1 Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000	600.000
	2 Kab. Kccrom	Orang/Kali	900.000	900.000
	3 Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000	2.700.000
	4 Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000	1.134.000
31	Papua Barat (Manokwari)			
	1 Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000	900.000
	2 Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000	750.000
	3 Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000	2.650.000
	4 Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000
4	SEWA KENDARAAN JEEP/DOUBLE GARDANG PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD			
1	Sewa Kendaraan			
	1 Pejabat Negara	PP	600.000	
	2 Pimpinan DPRD	PP	600.000	
5	TAKSI PERJALAHAN DINAS DALAM NEGERI			
1	Taksi			
	1 Aceh	Orang/Kali	123.000	123.000
	2 Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000	232.000
	3 Riau	Orang/Kali	94.000	94.000
	4 Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000	137.000
	5 Jambi	Orang/Kali	147.000	147.000
	6 Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	190.000
	7 Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000	128.000
	8 Lampung	Orang/Kali	167.000	167.000
	9 Bengkulu	Orang/Kali	109.000	109.000
	10 Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000	90.000
	11 Banten	Orang/Kali	446.000	446.000
	12 Jawa Barat	Orang/Kali	166.000	166.000
	13 DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000	256.000
	14 Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000	75.000
	15 DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000	118.000
	16 Jawa Timur	Orang/Kali	194.000	194.000
	17 Bali	Orang/Kali	159.000	159.000
	18 Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	231.000
	19 Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000	108.000
	20 Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000	135.000
	21 Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000	111.000

22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	150.000	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	450.000	450.000
24	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	102.000	102.000
25	Gorontalo	Orang/ Kali	138.000	138.000
26	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	240.000	240.000
27	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	313.000	313.000
28	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	145.000	145.000
29	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	165.000	165.000
30	Maluku	Orang/ Kali	171.000	171.000
31	Maluku Utara	Orang/ Kali	140.000	140.000
32	Papua	Orang/ Kali	215.000	215.000
33	Papua Tengah	Orang/ Kali	431.000	431.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	182.000	182.000

2.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MADYA	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DALAM DAERAH/LUAR DAERAH LUAR PROVINSI							
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	

2.5. SATUAN BIAYA REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DALAM DAERAH			
1	Pejabat Negara	OH	125.000	
2	Pejabat Daerah	OH	100.000	
3	ASN Eselon II	OH	75.000	
	LUAR DAERAH			
1	Pejabat Negara	OH	250.000	
2	Pejabat Daerah	OH	200.000	
3	ASN Eselon II	OH	150.000	

2.6. SATUAN BIAYA MENGURUS JENAZAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENGURUSAN JENAZAH							
1	Biaya Permetian	OH	45.000.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
2	Biaya Pengangkutan	OH	Menurut Tarif yang Berlaku dan Alat Angkutan yang Digunakan					

2.7. SATUAN BIAYA RAPID TEST/SWAB TEST/PCR TEST

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAPID TEST/SWAB TEST/PCR TEST			
1	Biaya Rapid Test	Orang/ Kali	150.000	
2	Rapid Test/Swab Test/PCR Test	Orang/ Kali	1.000.000	

2.8. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (SATUAN MATA UANG US\$/DOLLAR)

NO.	NEGARA	SATUAN	BESARAN (Rp)					KETERANGAN
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UANG HARIAN							
1	Amerika Serikat							
	1 Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	382	
	2 Kanada	OH	447	404	368	307	307	
2	Amerika Selatan							
	1 Argentina	OH	534	402	351	349	349	
	2 Venezuela	OH	557	388	344	343	343	
	3 Brazil	OH	436	341	291	241	241	
	4 Chile	OH	415	316	270	222	222	
	5 Columbia	OH	436	323	276	254	254	
	6 Peru	OH	459	347	320	276	276	
	7 Suriname	OH	398	295	352	207	207	
	8 Ekuador	OH	385	273	242	241	241	
3	Amerika Tengah							
	1 Mexico	OH	493	366	324	323	323	
	2 Kuba	OH	406	305	261	221	221	
	3 Panama	OH	414	342	306	271	271	
4	Eropa Barat							
	1 Austria	OH	504	453	318	317	317	
	2 Belgia	OH	466	419	282	281	281	
	3 Prancis	OH	512	464	382	381	381	
	4 Rep Federasi Jerman	OH	447	415	285	285	285	
	5 Belanda	OH	463	416	272	271	271	
	6 Swiss	OH	636	570	403	401	401	
5	Eropa Utara							
	1 Denmark	OH	567	491	343	301	301	
	2 Finlandia	OH	453	409	354	313	313	
	3 Norwegia	OH	621	559	389	386	386	
	4 Swedia	OH	466	436	342	341	341	
	5 Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582	582	
6	Eropa Selatan							
	1 Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	333	
	2 Kroasia	OH	555	506	406	405	405	
	3 Spanyol	OH	457	413	287	286	286	
	4 Yunani	OH	422	379	242	241	241	
	5 Italia	OH	702	637	446	427	427	
	6 Portugal	OH	425	382	242	241	241	
	7 Serbia	OH	417	375	326	288	288	
7	Eropa Timur							
	1 Bulgaria	OH	406	367	320	284	284	
	2 Czech	OH	618	526	447	367	367	
	3 Hongaria	OH	485	438	390	345	345	
	4 Polandia	OH	461	415	360	319	319	
	5 Rumania	OH	416	381	313	277	277	
	6 Rusia	OH	556	512	407	406	406	
	7 Slovakia	OH	437	394	341	303	303	
	8 Ukraina	OH	485	436	375	331	331	
8	Afrika Barat							
	1 Nigeria	OH	361	313	292	291	291	
	2 Senegal	OH	384	317	237	231	231	
9	Afrika Timur							
	1 Etopia	OH	358	295	221	193	193	
	2 Kenya	OH	384	317	237	225	225	
	3 Madagaskar	OH	296	244	182	181	181	
	4 Tanzania	OH	350	290	244	218	218	
	5 Zimbabwe	OH	328	281	248	247	247	
	6 Mozambique	OH	399	329	265	264	264	
10	Afrika Selatan							
	1 Namibia	OH	405	334	268	233	233	
	2 Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	251	
11	Afrika Utara							
	1 Aljazair	OH	342	308	287	286	286	
	2 Mesir	OH	409	303	235	211	211	
	3 Maroko	OH	304	251	192	191	191	
	4 Tunisia	OH	293	241	187	186	186	
	5 Sudan	OH	342	282	210	184	184	
	6 Libia	OH	308	254	189	165	165	
12	Asia Barat							
	1 Azerbaijan	OH	498	459	365	364	364	
	2 Bahrain	OH	416	294	228	214	214	
	3 Irak	OH	447	325	253	231	231	
	4 Yordania	OH	406	292	236	225	225	
	5 Kuwait	OH	456	325	296	294	294	
	6 Libanon	OH	357	267	207	186	186	
	7 Qatar	OH	386	276	215	196	196	
	8 Arab Suriah	OH	358	257	200	196	196	
	9 Turki	OH	456	364	283	253	253	
	10 Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	301	
	11 Yaman	OH	353	241	197	196	196	
	12 Saudi Arabia	OH	450	331	269	251	251	
	13 Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249	249	
13	Asia Timur							

1	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206	206
2	Hongkong	OH	472	320	287	286	286
3	Jepang	OH	519	303	262	261	261
4	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	296
5	Korea Utara	OH	494	321	300	278	278
14	Asia Selatan						
1	Afganistan	OH	385	226	173	172	172
2	Bangladesh	OH	339	196	167	166	166
3	India	OH	422	329	327	325	325
4	Pakistan	OH	343	203	182	181	181
5	Sri Lanka	OH	380	242	209	199	199
6	Iran	OH	421	312	243	217	217
15	Asia Tengah						
1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	254
2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	333
16	Asia Tenggara						
1	Philipina	OH	412	278	222	221	221
2	Singapore	OH	530	363	279	276	276
3	Malaysia	OH	394	262	219	218	218
4	Thailand	OH	392	275	211	201	201
5	Myanmar	OH	368	250	197	196	196
6	Laos	OH	380	262	202	196	196
7	Vietnam	OH	383	265	204	196	196
8	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	196
9	Kamboja	OH	296	223	197	196	196
10	Timor Lesta	OH	392	354	229	196	196
17	Asia Pasifik						
1	Australia	OH	636	585	394	393	393
2	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	276
3	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	224
4	Papua Nugini	OH	520	478	319	259	259
5	Fiji	OH	363	329	221	179	179
2	TIKET PESAWAT						
1	Amerika Utara						
1	Chicago	PP	12.733	6.891	3.662	3.662	3.662
2	Houston	PP	12.635	6.487	3.591	3.591	3.591
3	Los Angeles	PP	11.411	5.925	3.242	3.242	3.242
4	New York	PP	15.101	6.179	3.839	3.839	3.839
5	Ottawa	PP	12.266	6.924	4.083	4.083	4.083
6	San Fransisco	PP	13.438	7.138	2.987	2.987	2.987
7	Toronto	PP	11.750	8.564	3.201	3.201	3.201
8	Vancouver	PP	10.902	7.458	3.277	3.277	3.277
9	Washington	PP	15.150	8.652	3.930	3.930	3.930
2	Amerika Selatan						
1	Bogota	PP	18.399	9.426	7.713	7.713	7.713
2	Brazilia	PP	16.393	11.518	5.970	5.970	5.970
3	Boenos Aires	PP	23.000	15.300	10.400	10.400	10.400
4	Caracas	PP	23.128	13.837	6.825	6.825	6.825
5	Paramaribo	PP	15.018	9.494	7.353	7.353	7.353
6	Santiago de Chile	PP	21.874	15.539	8.900	8.900	8.900
7	Quito	PP	17.325	16.269	12.127	12.127	12.127
8	Lima	PP	8.263	8.263	5.038	5.038	5.038
3	Amerika Tengah						
1	Mexico City	PP	11.822	7.831	3.966	3.966	3.966
2	Havana	PP	14.702	11.223	7.335	7.335	7.335
3	Panama City	PP	15.532	9.306	6.195	6.195	6.195
4	Eropa Barat						
1	Vienna	PP	10.520	4.177	3.357	3.357	3.357
2	Brussels	PP	10.713	5.994	3.870	3.870	3.870
3	Marseilles	PP	10.850	5.074	3.541	3.541	3.541
4	Paris	PP	10.724	6.085	3.331	3.331	3.331
5	Berlin	PP	10.277	6.126	3.959	3.959	3.959
6	Bern	PP	11.478	6.778	4.355	4.355	4.355
7	Bonn	PP	10.945	5.023	3.753	3.753	3.753
8	Hamburg	PP	9.938	7.639	4.108	4.108	4.108
9	Geneva	PP	8.166	5.370	4.333	4.333	4.333
10	Amsterdam	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331
11	Den Haag	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331
12	Frankfurt	PP	7.660	4.037	1.065	1.065	1.065
5	Eropa Utara						
1	Copenhagen	PP	9.696	4.920	3.730	3.730	3.730
2	Helsinki	PP	10.023	5.931	3.681	3.681	3.681
3	Stockholm	PP	9.917	5.506	3.433	3.433	3.433
4	London	PP	11.410	7.293	4.153	4.153	4.153
5	Oslo	PP	9.856	4.773	4.049	4.049	4.049
6	Eropa Selatan						
1	Sarajevo	PP	11.778	7.129	6.033	6.033	6.033
2	Zagreb	PP	16.974	10.177	5.182	5.182	5.182
3	Athens	PP	14.911	9.256	8.041	8.041	8.041
4	Lisbon	PP	9.309	4.746	3.383	3.383	3.383
5	Madrid	PP	10.393	4.767	3.631	3.631	3.631
6	Rome	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500
7	Beograd	PP	10.318	6.404	5.564	5.564	5.564
8	Vatican	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500
7	Eropa Timur						
1	Bratislava	PP	7.125	4.423	3.842	3.842	3.842
2	Bucharest	PP	8.839	4.982	4.113	4.113	4.113

3	Kiev	PP	10.860	6.029	5.193	5.193	5.193
4	Moscow	PP	9.537	7.206	5.143	5.143	5.143
5	Praque	PP	19.318	11.848	6.748	6.748	6.748
6	Sofia	PP	7.473	6.346	3.612	3.612	3.612
7	Warsawa	PP	10.777	5.052	3.447	3.447	3.447
8	Budapest	PP	8.839	5.979	2.187	2.187	2.187
8	Afrika Barat						
1	Dakkar	PP	12.900	9.848	8.555	8.555	8.555
2	Abuja	PP	10.281	7.848	6.818	6.818	6.818
9	Afrika Timur						
1	Addis Ababa	PP	7.700	5.808	5.552	5.552	5.552
2	Nairobi	PP	8.732	7.966	6.081	6.081	6.081
3	Antananarive	PP	11.779	9.000	8.282	8.282	8.282
4	Dar Es Salaam	PP	8.947	6.599	5.733	5.733	5.733
5	Harare	PP	11.118	10.600	5.747	5.747	5.747
10	Afrika Selatan						
1	Windhoek	PP	18.241	11.774	7.510	7.510	7.510
2	Cape Town	PP	17.182	9.703	8.429	8.429	8.429
3	Johannesburg	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216
4	Maputo	PP	11.255	8.524	6.275	6.275	6.275
5	Pretoria	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216
11	Afrika Utara						
1	Algiers	PP	9.536	6.593	5.710	5.710	5.710
2	Cairo	PP	8.683	7.122	4.483	4.483	4.483
3	Khartoum	PP	5.904	4.507	3.915	3.915	3.915
4	Rabat	PP	8.910	7.721	5.665	5.665	5.665
5	Tripoli	PP	6.551	5.706	4.975	4.975	4.975
6	Tunisia	PP	9.419	5.018	3.619	3.619	3.619
12	Asia Barat						
1	Manama	PP	6.573	6.154	4.827	4.827	4.827
2	Baghdad	PP	5.433	4.148	3.545	3.545	3.545
3	Amman	PP	7.561	6.431	3.545	3.545	3.545
4	Kuwait	PP	6.771	4.273	3.110	3.110	3.110
5	Beirut	PP	7.703	4.490	3.730	3.730	3.730
6	Doha	PP	5.216	3.639	2.745	2.745	2.745
7	Damascus	PP	8.684	5.390	3.325	3.325	3.325
8	Ankara	PP	9.449	6.643	3.581	3.581	3.581
9	Abu Dhabi	PP	5.283	4.976	2.727	2.727	2.727
10	Sanaa	PP	8.205	5.878	3.679	3.679	3.679
11	Jeddah	PP	6.446	3.785	3.321	3.321	3.321
12	Muscat	PP	6.469	5.156	3.727	3.727	3.727
13	Riyadh	PP	5.359	3.510	3.000	3.000	3.000
14	Istanbul	PP	11.061	4.435	2.467	2.467	2.467
15	Dubai	PP	4.207	4.207	1.920	1.920	1.920
13	Asia Tengah						
1	Tashkent	PP	13.617	8.453	7.343	7.343	7.343
2	Astana	PP	13.661	12.089	8.962	8.962	8.962
3	Suva	PP	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244
14	Asia Timur						
1	Beijing	PP	2.595	2.140	1.623	1.623	1.623
2	Hongkong	PP	3.028	2.633	1.257	1.257	1.257
3	Osaka	PP	3.204	2.686	1.864	1.864	1.864
4	Tokyo	PP	3.731	2.675	1.835	1.835	1.835
5	Pyongyang	PP	4.040	2.220	1.660	1.660	1.660
6	Seoul	PP	3.233	2.966	1.737	1.737	1.737
7	Shanghai	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304
8	Guangzhou	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304
15	Asia Selatan						
1	Kaboul	PP	6.307	3.905	3.208	3.208	3.208
2	Teheran	PP	5.800	4.600	3.200	3.200	3.200
3	Colombo	PP	3.119	2.562	1.628	1.628	1.628
4	Dhaka	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092
5	Islamabad	PP	5.482	3.333	2.501	2.501	2.501
6	Karachi	PP	4.226	3.633	2.321	2.321	2.321
7	New Delhi	PP	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500
8	Mumbai	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092
16	Asia Tenggara						
1	Bandar Seri Bagawan	PP	1.628	1.147	919	919	919
2	Bangkok	PP	2.344	1.155	823	823	823
3	Davao City	PP	2.757	2.558	1.641	1.641	1.641
4	Hanoi	PP	1.833	1.833	1.656	1.656	1.656
5	Ho Chi Minh	PP	1.677	1.503	1.235	1.235	1.235
6	Johor Bahru	PP	1.195	911	525	525	525
7	Kota Kinabalu	PP	1.894	1.427	694	694	694
8	Kuala Lumpur	PP	1.158	659	585	585	585
9	Manila	PP	2.453	1.614	1.150	1.150	1.150
10	Penang	PP	918	766	545	545	545
11	Phnom Penh	PP	2.202	1.981	1.627	1.627	1.627
12	Singapore	PP	991	673	403	403	403
13	Vientiane	PP	2.274	2.025	1.420	1.420	1.420
14	Yangon	PP	1.468	1.212	1.053	1.053	1.053
15	Tawau	PP	1.894	1.427	694	694	694
16	Songkhla	PP	2.344	1.155	823	823	823
17	Asia Pasifik						
1	Canberra	PP	6.304	6.304	2.500	2.500	2.500
2	Darwin	PP	6.689	4.900	3.964	3.964	3.964
3	Melbourne	PP	4.886	3.814	2.858	2.858	2.858
4	Noumea	PP	6.940	5.917	1.916	1.916	1.916

	5	Perth	PP	5.771	1.801	1.525	1.525	1.525	
	6	Port Moresby	PP	8.252	17.090	13.835	13.835	13.835	
	7	Sydney	PP	4.629	4.237	2.557	2.557	2.557	
	8	Vanimo	PP	3.318	2.740	2.380	2.380	2.380	
	9	Wellington	PP	11.750	9.830	4.120	4.120	4.120	
	10	Baku	PP	13.234	8.556	2.281	2.281	2.281	



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 33 TAHUN 2022
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2022

FORMAT PENGANTAR USULAN STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS
KOP SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Standar Harga
Satuan Khusus TA. 2022

Kepada Yth.
BUPATI KARO
Cq. Kepala BKAD Selaku Ketua
Tim Penyusun Standar Harga
Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun 2022
di-

Tempat

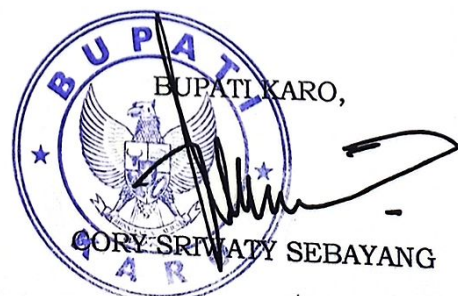
Sehubungan dengan Surat Bupati Karo Nomor tanggal perihal
Usulan Standar Harga Satuan Daerah TA. 2022 (Surat Pengantar Usulan Standar
Harga Satuan Daerah TA. 2022), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD (OPD pengusul), kami mengusulkan rincian objek untuk ditetapkan pada standar harga satuan khusus Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Kajian Usulan Standar Khusus dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas usulan dimaksud.
3. Terhadap usulan tersebut, kami menyatakan bertanggung jawab atas:
 - a. kebenaran formal dan material; dan
 - b. konsekuensi penggunaan dan penerapan usulan tersebut.

Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 37
 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
 ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

4.1. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
	1 Pejabat Eselon II	Unit	513.709.000	

4.2. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)			KETERANGAN
			PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)					
	1 Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4	Unit	261.525.000	308.020.000	473.360.000	

4.3. SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
	1 Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
	2 Roda 4 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
	3 Roda 4 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	

4.4. SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)		KETERANGAN
			OPERASIONAL	LAPANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)				
	1 Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit	31.851.000	35.600.000	



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARO NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
	1 Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	
	2 Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	
	3 Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.420.000	

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)			KETERANGAN
1	2	3	RODA EMPAT	DOUBLE	RODA DUA	7
			4	5	6	
1	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
	1 Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	33.470.000	36.070.000	3.700.000	

5.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR			
	1 Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
	2 Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
	3 Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000	

